



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE ARYANA
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 136818

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.452.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 870.000.000
2. Tanah Seluas 1732 m2 di KAB / KOTA ---, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 257.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/200 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **330.950.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 7.200.000
3. LAINNYA, POLIGON MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000
4. LAINNYA, GIANT MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOBIL, TOYOTA INOVA G Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
6. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	69.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.839.186
F. HARTA LAINNYA	Rp.	323.377.371
Sub Total	Rp.	3.190.966.557
III. HUTANG	Rp.	392.377.371
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.798.589.186

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.